LAPORAN KINERJA INSTANSI P
DINAS BINA MARGA DAN SUMB

PEMERINTAH KOTA BEKASI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2024 ini dapat selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi merupakan suatu pertanggungjawaban formal sebagai pengguna anggaran negara sebagaimana diamanatkan PP Nomor 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi menyusun LKIP Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi di Bidang Pekerjaan Umum selama Tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2024 dapat direalisasikan dengan baik.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dicapai oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi karena adanya komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dalam mendukung Visi dan Misi Kota Bekasi. Disamping komitmen tersebut, peningkatan akuntabilitas dan kinerja operasional Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi juga didukung dengan motivasi yang tinggi dan kerja keras seluruh staf Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 disusun, merupakan gambaran kinerja yang menyajikan keberhasilan maupun kekurangan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Bekasi, 13 Januari 2025

Kepala Dinas Bina Marga
Dan Sumber Daya Air,

Drs. Aceng Solahudin
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 196909191990061001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …… i
Daftar Isi……...iii
Daftar Tabel ……..……v
Daftar Gambar vi
Bab I PENDAHULUAN ……....1
1.1 Latar Belakang ……....1
1.2 Tugas, Fungsi dan wewenang Organisasi …….....2
1.3 Sumber Daya Manusia ……4
1.4 Aspek Strategis Organisasi…….……..7
1.5 Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi ……...9
1.6 Sistematika Penyajian ……10
Bab II PERENCANAAN KINERJA ……12
2.1 Rencana Startegis ……12
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah ……...12
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air ……13
2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) ……15
2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ……..16
2.3 Rencana Anggaran Perubahan Dinas BMSDA Kota Bekasi 2024 ……..17
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA ……19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ……19
3.2 Analisis Capaian Indiktor Kinerja Utama ……...21
3.2.1 Sasaran Strategis Mewujudkan Penyelenggaran Pemerintahan yang akuntabel……..21
3.2.2 Sasaran Strategis Terlaksananya penanganan Infrastruktur dan data informasi Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan beriorentasi lingkungan …….……23
3.3 Analisis Penggunaan Sumber Daya……37
3.4 Analisis Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis ..40
3.5 Prestasi Organisasi 40
Bab IV PENUTUP 52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai PerJenis Pendidikan Tahun 2024 4

Tabel 1.2 PNS DBMSDA Berdasarkan Golongan Ruang 5

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 5

Tabel 1.4 Indentifikasi Permasalahan yang ada pada Dinas BMSDA 8

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Bekasi 2024-2026 13

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 14

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama ……15

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja DBMSDA Tahun 2024 (Esellon II) 17

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 18

Tabel 3.1 Evaluasi Kinerja Tahun 2024 20

Tabel 3.2 Perbandingan Nilai AKIP Dinas BMSDA Tahun 2024-2026 21

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator program tahun 2024……..22

Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Presentase penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi jalan 24

Tabel 3.5 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator Sasaran 25

Tabel 3.6 Indikator Capaian Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi jalan ……...25

Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi drainase perkotaan 27

Tabel 3.8 Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi drainase perkotaan…….30

Tabel 3.9 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator Sasaran…….....31

Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan ……32

Tabel 3.11 Efisiensi Anggaran Berdasrkan Pencapaian Indikator sasaran 34

Tabel 3.12 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan……..…...34
Tabel 3.13 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Presentase Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA……...…….36
Tabel 3.14 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA…….…..…36
Tabel 3.15 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator sasaran…….37
Tabel 3.16 Tabel Anggaran Belanja pada Dinas BMSDA ……37
Tabel 3.17 Realisasi Anggaran DBMSDA Tahun 2024……..39
Tabel 3.18 Analisis Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2024……...……....40
Tabel 3.19 Penghargaan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air……51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 4

Gambar 2.1 Perkin Awal Dan Perkin Perubahan 6

Gambar 3.1 Tim URC Pematusan 30

Gambar 3.2 Tim Alat Berat 31

Gambar 3.3 Tim URC SDA 31

Gambar 3.4 Tim URC PJU 39

Gambar 3.5 Tim URC Trisula 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintah yang berorientasi pada hasil, (*result oriented government*). Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Dasar hukum penyusunan LKIP Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
4. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air. Dinas BMSDA dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas BMSDA Kota Bekasi akan senantiasa menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Adapun peran layanan penyediaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh DBMSDA Kota Bekasi meliputi:

a. Menyediakan infrastruktur jalan kota yang mantap, aman, efisien, nyaman dan terjangkau;
b. Meningkatkan pengembangan kinerja sumber daya air Kota Bekasi;
c. Meningkatkan pelayanan ketersediaan lampu penerangan jalan umum;
d. Pengelolaan dan pemeliharaan taman;
e. Perizinan dan penertiban reklame.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terjadi perubahan tentang pembagian urusan pemerintah. Salah satu perubahan krusial dari Undang-undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Perubahan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas berdampak pada perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang harus mengikuti pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah sebagaimana tercantum pada lampiran Undang-undang 23 Tahun 2014 tersebut. Dampak dari hal tersebut salah satunya ialah terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi No 13 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi bahwa Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, jalan, dan jasa konstruksi.

Sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Memiliki tugas untuk membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi serta Bidang Prasarana Jalan meliputi pengembangan penerangan jalan umum dan taman

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kepala Dinas BMSDA melaksanakan fungsi :

a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, jalan dan jasa konstruksi;
c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Pembinaan administrasi perkantoran;
e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Struktur organisasi pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasasi DBMSDA

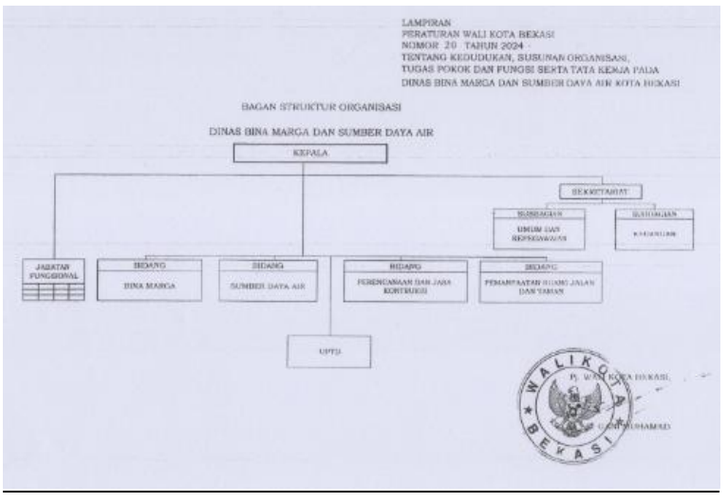

1.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi saat ini memiliki aparat/ personil dengan jumlah pegawai pada tahun 2024 sebanyak 338 pegawai dengan rincian 135 pegawai negeri sipil dan 193 TKK. Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi tercantum pada diagram berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai per Jenis Pendidikan Tahun 2024 (orang)

URAIAN	JUMLAH
S2	28
S1	66
D4	1

D 3	1
SLTA	34
SLTP	4
SD	1
Jumlah	**135**

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DBMSDA Kota

Gambar di atas menunjukan bahwa sebagian besar Sumber Daya Aparatur di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berpendidikan Strata 1/ sarjana.Berikut ini jumlah aparatur yang terdapat pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berdasarkan golongan ruang.

Tabel 1.2
PNS DBMSDA Berdasarkan Golongan Per Desember 2024

URAIAN	JUMLAH	PROSENTASE
Golongan IV	14 pegawai	10,37
Golongan III	84 pegawai	62.22
Golongan II	37 pegawai	27,41
Golongan I	0 pegawai	0
Jumlah	**135 pegawai**	**100**

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DBMSDA Kota

Selain sumber daya aparatur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi juga didukung sarana dan prasarana perkantoran yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dalam penyelenggaraan pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
1	Tanah dan Bangunan	2,275 m2	√		
2	Gedung	1	√		
3	Listrik	28	√		

4	Telpon	1	√		
5	Area Parkir	1	√		
6	Ruang Rapat	1	√		
7	Ruang Arsip	2	√		
8	Kendaraan Roda 4	64	59		5
9	Kendaraan Roda 2	63	58		5
10	Kendaraan Roda 6	34	√		
11	Kendaraan Roda 3	8	√		
12	Meja Rapat	11	7	4	
13	Ac	67	49	18	
14	Komputer Pc	50	45	5	
15	Komputer Notebook	26	22		4
16	Printer	91	60	31	
17	Meja Kerja	354	√		
18	Kursi Kerja	354	√		
19	Pompa Banjir	123	√		
20	Pintu Air	102	√		
21	Screen Proyektor	5	√		
22	Proyektor/ infocus	5	√		
23	Scanner	10	√		
24	Drone	2	√		
25	Mesin Penghancur kertas	3	√		
26	Sound System	5	√		
27	Meteran dorong	37	√		
28	Thermometer aspal	1	√		
29	Lemari Besi	20	√		
30	Lemari Arsip pintu kaca	10	√		

31	Rak besi Arsip	16	√		
32	Lemar Kerja	6	√		
33	Sofa	4	√		
35	Stamper	5	√		
35	Tandem Roller	3	√		
36	Camera Video	3	√		
37	Drill machine	9	√		
38	Alat Pemeriksa Beton	1	√		
39	Concret Hammer Set	2	√		
40	Excavator	8	√		

Kondisi asset pada tabel diats Sebagian besar dalam keadaan baik, namun dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi masih memerlukan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja sehingga pelayanan di Dinas bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Setelah mengkaji dan membandingkan antara RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2024, dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 serta situasi dan kondisi yang ada terhadap tupoksi, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Dalam perumusan isu strategis Kota Bekasi tahun 2024-2026 dilakukan pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mana menggunakan Pendekatan Teknokratis. Pendekatan Teknokratis dilakukan melalui analisis proyeksi perkembangan Kota Bekasi berdasarkan kondisi dan permasalahan pada bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air yang ada saat ini untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Untuk itu, indentifikasi permasalahan yang ada pada DBMSDA Kota Bekasi yang harus ditangani dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan PD berdasarkan pemetaan permasalahannya dapat dilihat pada tabel 1.4 dibawah ini.

Tabel 1.4
Indentifikasi Permasalahan yang ada pada Dinas BMSDA

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	belum optimal kinerja penyelenggaraan urusan infrastruktur (bidang bina marga dan sumber daya air)	Kinerja PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kurang optimal	Belum meratanya tingkat kompetensi sumber daya manusia untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan PD
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbatas dan kondisi kurang baik
			Jumlah Petugas tidak sebanding dengan wilayah yang harus ditangani
		belum optimalnya preservasi drainase perkotaan	banyak jalan kota mengalami genangan yang cukup tinggi ketika turun hujan
			sistem drainase perkotaan yang sudah mulai terintegrasi namun banyak saluran drainase perkotaan mengalami pendangkalan dan sedimentasi
			Banyaknya Bangunan liar yang dibangun di badan dan diatas sungai
			Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan drainase lingkungan

		belum optimalnya preservasi jalan	penambahan jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan penambahan lajur jalan.
			Kondisi jalan kota bekasi belum semua dalam kondisi baik
			Belum meratanya sebaran titik penerangan jalan umum di Kota Bekasi
			Belum optimalnya pengendalian reklame

Sumber : Renstra Dinas BMSDA Tahun 2024-2026

Permasalahan yang akan di tangani melalui Renstra ditahun mendatang berdasarkan evaluasi dan analisis saat ini yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi sumber daya manusia bidang ilmu teknis kurang memadai Pelaksanaan tugas fungsional sebagai PPK, PPTK, PELTEK dan Pembantu PELTEK kurang efisien dan efektif.
2. Lemahnya pembinaan/ bantuan hukum dalam perkara kegiatan dan administrasi dokumen – dokumen.
3. Standar operasional prosedur dalam pelayanan publik belum maksimal diterapkan.
4. Kurang fasilitas untuk menunjang kerja karyawan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan PD terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja PD antara lain:
    - Sarana dan prasarana pelayanan PD yang kurang memadai
    - Kurangnya staf ahli sehingga pelayanan menjadi lambat
    - Terkendala sistem koordinasi birokrasi lintas sektor yang tidak mudah

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan untuk membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi dan Bidang Pemanfaatan Ruang Jalan dan Taman.

1.5 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, maka program dan kegiatan Dinas BMSDA diarahkan untuk melaksanakan urusan pemeritah bidang pekerjaan umum, yang dapat dikelompokkan menjadi:

a. Layanan Perbaikan Jalan Umum
   Produk layanan yang diberikan antara lain surat permohonan perbaikan jalan umum
b. Layanan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
   Produk layanan yang diberikan antara lain Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang milik Jalan.
c. Layanan peil Banjir
   Produk layanan yang diberikan antara lain advis teknis peil banjir

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

   Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

   1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
   2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;

3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan yang baik berdampak pada keberhasilan kinerja Perangkat Daerah, oleh karenanya perlu adanya perencanaan strategis yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan Strategis merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan 5 tahunan. Oleh Karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Dokumen Renstra Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kota, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPD. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS).

2.1.1 Visi dan Misi Kota

Dalam penyusunan rencana Pembangunan jangka menengah daerah yang dalam keadaan normal merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, namun dengan adanya regulasi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepada daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru maka penyusunan menggunakan pedekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi namun kota Bekasi merumuskan konsep dengan mempertimbangkan Indikator dan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, Misi RPJPD Kota Bekasi 2005-2025, Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, Misi RPJMD Kota Bekasi 2018-2023, dan isu – isu strategis yang berkembang. Berikut ini turunan dari

konsep yaitu tujuan dan sasaran pada bagan alur cascade RPD Kota Bekasi 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026

Sumber : RPD Kota Bekasi 2024-2026

Berdasarkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, serta tugas pokok dan fungsinya, Dinas BMSDA Kota Bekasi mendukung pada pencapaian Tujuan 1 dan 3.

2.1.2 Tujuan Dan Sasaran Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsiyang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET SASARAN		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya	Tingkat akuntabilitas kinerja DBMSDA	Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya	Tingkat akuntabilitas kinerja DBMSDA	BB	BB	BB
Optimalisasi penanganan (Bekasi Quick Respon) Infrastruktur Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan, dan pengembangan kehati	Presentase Optimalisasi penanganan (Bekasi Quick Respon) Infrastruktur Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan, dan pengembangan kehati	terlaksananya penanganan Infrastruktur dan data informasi Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan beriorentasi lingkungan	Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi jalan	77,85%	79,18%	80,52%
			Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi drainase perkotaan	58,39%	59,48%	60,57%
			Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan	67,81%	69,32%	70,83%
			Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA	100%	100%	100%

2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air di tetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

NO	IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN		
						TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai AKIP Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	= Perencanaan Kinerja (30%) + Pengukuran Kinerja (30 %) + Pelaporan Kinerja (15 %) + Evaluasi Akuntabiltas Kinerja Internal (25%)	%	BB	BB	BB	BB
2	Terlaksananya penanganan Infrastruktur dan data informasi Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan beriorentasi lingkungan	Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi jalan	= Program penyelenggaraan jalan (98%) + Program Penataan Ruang (2%)	%	75,02%	77,85 %	79,18%	80,52%
		Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi drainase perkotaan	= Program pengelolaan sumber daya air (55%) + program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase (45%)	%	55,13%	58,39 %	59,48%	60,57%
		Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan	= Program pengembangan pemukiman (81%) + program Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (19%)	%	65,56%	67,81 %	69,32%	70,83%
		Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA	= Presentase Program pengembangan Jasa Konstruksi	%	0%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra DBMSDA Tahun 2024-2026

2.2 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan perjanjian kinerja yaitu mendorong komitmen penerima amanah dalam melaksanakan amanah yang diterimanya dan diharapkan terus meningkatkan kinerjanya. Perjanjian kinerja juga berfungsi menciptakan tolok ukur kinerja yakni sebagai alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi.

Perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

a.Terjadinya pergantian atau mutasi pejabat;

b.Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran;

c.Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Dinas BMSDA Kota Bekasi Menyusun perjanjian kinerja perubhan karena terjadinya pergantian pejabat dan perubahan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengasu pada Renstra, Renja, IKU dan DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kota Bekasi sebagai Berikut :

Gambar 2.1 Perkin awal dan Perkin Perubahan

Pada bulan Oktober terjadi pergantian kepala dinas. Kepala dinas yang baru dilantik berdasarkan SK Wali Kota Nomor 821.2/ Kep.98-BKPSDM/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024.

Commented [1]: update

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja DBMSDA Tahun 2024 (Esellon II)

Commented [2]: Punten pak kur mohon di update

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	1. Nilai AKIP Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air		BB	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	BB
					Triwulan IV	
2 3	Terlaksananya penanganan Infrastruktur dan data informasi Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan beriorentasi lingkungan	1. Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi jalan	%	77,85	Triwulan I	0
					Triwulan II	19,46
					Triwulan III	38,92
					Triwulan IV	19,46
		2. Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi drainase perkotaan	%	58,39	Triwulan I	0
					Triwulan II	10
					Triwulan III	28,39
					Triwulan IV	20
		3. Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan	%	67,81	Triwulan I	16,95
					Triwulan II	16,95
					Triwulan III	16,95
					Triwulan IV	16,95
		4. Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA	%	100	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	

Sumber : Perkin Esselon 2 DBMSDA Tahun 2024

2.3 Rencana Anggaran Perubahan Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun 2024

Dinas BMSDA Kota Bekasi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 670.944.914.772,- , dalam dinamika pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perubahan kebijakan dari instansi vertical dan kebijakan kepala daerah, sehingga diperlukan penyesuaian penganggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui mekanisme APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2024, anggaran Dinas BMSDA Kota Bekasi mengalami perubahan menjadi Rp 741.554.591.602,-

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Per Sasaran Stratagis

No	Sasaran	Anggaran Perubahan	%	Keterangan
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Rp. 96.310.166.720	13	Sebesar 13 % dibandingkan dengan total belanja DBMSDA Tahun 2024
2	Terlaksananya penanganan Infrastruktur dan data informasi Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan beriorentasi lingkungan	Rp. 645.244.424.882	87	Sebesar 87% dibandingkan dengan belanja DBMSDA 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Bekasi.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kota Bekasi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator sasaran. Media pengukuran kinerja adalah Lampiran Pengukuran Kinerja (PK).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerjatersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

– ≥100% = Target Tercapai

- < 100% = Target Tidak Tercapai

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1. Indikator Kinerja

   Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes).

2. Indikator Sasaran

   Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pengumpulan data kinerja Dinas BMSDA dilakukan melalui rekapitulasi dan analisis data pendukung yang berasal dari Sekretariat, Bidang, Subbag , UPTD dan Seksi

Sasaran yang ditetapkan TAPKIN 2024 ada 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator sasaran, yang terinci sebagai berikut :

Tabel 3.1
Evaluasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Mewujudkan Penyelenggaran Pemerintahan yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja DBMSDA		BB	BB (79,94)	100%
2	Terlaksananya penanganan Infrastruktur dan data informasi Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan beriorentasi lingkungan	Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi jalan	Persen	77,85%	79,79%	102,5%
		Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi	Persen	58,39%	58,39%	100%

Commented [3]: Update nilai ini masih 2024

Commented [4R3]: nilai sudah update

		preservasi drainase perkotaan				
		Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan	Persen	67,81%	68,18%	100,54%
		Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA	Persen	100%	90%	90%

3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.2.1 Sasaran Strategis 1 : Mewujudkan Penyelenggaran Pemerintahan yang akuntabel

1. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja DBMSDA

Commented [5]: Belum diupdate

Commented [6R5]: sudah update 2024

Dilihat dari existing Tahun 2018 Nilai AKIP Dinas BMSDA mengalami kenaikan yang cukup besar dari 70,48 menjai 79,94 pada akhir tahun 2024. Perbandingan Nilai AKIP Dinas BMSDA tahun 2018-2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Nilai AKIP Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun 2020-2024

Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Sasaran Pada tahun					
	Existing	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai AKIP	70,48	77,12	77,12	79,93	79,92	79,94

Sumber : Sekretariat Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun 2024

Pencapaian ini didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. 1.Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia kota Bekasi melalui 45 program prioritas Wali Kota Bekasi Tahun 2018-2024;
2. Etos kerja aparatur Dinas BMSDA yang semakin meningkat.

Table 3.3

Capaian Kinerja Indikator program tahun 2024

No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja	satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	%	100	100	100

3.2.2 Sasaran Strategis 2 : Terlaksananya penanganan Infrastruktur dan data informasi Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan beriorentasi lingkungan

Sasaran ini diukur melalui 4 (empat) indikator Kinerja Sasaran yaitu (1) Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi jalan, (2) Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi drainase perkotaan, (3) Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan, dan (4) Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA.

1. **Indikator Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi jalan**

   Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi jalan di Kota Bekasi sebesar 77,85 persen. Adapun capaian kinerja indikator Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut :

   Rumus Perhitungan = Program penyelenggaraan jalan (98%) + Program Penataan Ruang (2%)

   Program Penyelenggaraan Jalan

Indikator Program Persentase Infrastruktur Kebinamargaan dalam kondisi baik	Tahun 2024		
	Kondisi Ideal	Capaian	%Capaian (Capaian/Kondisi Ideal*Koefisien%)
	km	km	%
Pembangunan Jalan ,jembatan, dan pedestrian dibangun	4763,87	9,37	0,112%
Pembangunan Jalan ,jembatan, dan pedestrian ditingkatkan	3622,61	130,00	1,550%
Pembangunan Jalan ,jembatan, dan pedestrian direhabilitasi		130,00	1,550%
Pembangunan Jalan ,jembatan, dan pedestrian dipelihara		9,83	0,117%
% Total Capaian Jalan			3,33%
% Total Capaian Jalan + % Kondisi Tahun 0			79,37%
(% Total Capaian Jalan + % Kondisi Tahun 0)*98%			77,79%

   Program Penataan Ruang

Indikator Program Persentase sarana pemanfaatan ruang dalam kondisi baik	Tahun 2024		
	Kondisi Ideal	Capaian	%Capaian (Capaian/Kondisi Ideal*Koefisien%)
	buah	buah	%
Penataan dan Pemeliharaan Reklame	8	8	100%
% Total Capaian Reklame			100%

(% Total Reklame + % Kondisi Tahun 0)*2%	2%

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Presentase penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi jalan

Sasaran 2	Terlaksananya penanganan Infrastruktur dan data informasi Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan beriorentasi lingkungan				
Indikator	Tahun 2024				
	Target		Realisasi		Capaian
Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi jalan	77,85%	114,05 km 8 buah	79,79%	279,2 km 8 buah	102,5%

Sumber :Bidang Bina Marga Kota Bekasi Tahun 2024

Berikut daalah factor yang mendukung pencapaian indikator sebagai berikut :

1. Penyediaan sumber daya infrastruktur melalui pemenuhan anggaran infrastruktur dengan sumber dana APBD
2. Adanya UPTD 12 wilayah yang membagi beban kerja dimasing-masing wilayah.
3. Adanya Tim URC Sitambel yaitu Pengembangan sistem layanan cepat tanggap penanganan sampah, jalan, saluran, PJU, dan kemacetan berbasis IT
4. Etos kerja aparatur Dinas BMSDA yang semakin meningkat.
5. Adannya Tim URC Trisula yang mempunyai tugas melaksanakan penrtiban dan pembongkaran reklame, dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dalam rangka pendataan dan penertiban jaringan utilitas dan objek reklame yang berada di titik sarana dan prasarana kota pada setiap ruas jalan per wilayah Kecamatan di Kota Bekasi.

Gambar. 3.5 Tim URC Trisula

Dari table berikut dilihat bahwa dari 90,64% capaian realisasi anggaran, capaian indikator sasaran Persentase Jalan dalam kondisi baik yang dihasilkan sebesar 102,5% % sehingga terdapat efisiensi sumber daya (anggaran) sebesar 11,86%

Tabel 3.5
Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator sasaran

No	Indikator sasaran/ kebutuhan Anggaran / Efisiensi	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi jalan	77,85%	79,79%	102.5%
	Anggaran yang Dibutuhkan	268.622.802.658	246.172.155.478	91.64%
Nilai Efisiensi				**10,86%**

Program yang menunjang dalam pencapaian indikator Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi jalan adalah program Program penyelenggaraan jalan dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Adapun capaian kinerja indikator program sebagai berikut :

Tabel 3.6
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi jalan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan Jalan Baru	%	95,63	94,77	96,24	101,7
		Persentase Pemeliharaan Jalan Arteri + Kolektor	%	131,69	95,64	97,11	101,53
		Persentase Pemeliharaan Jalan Lingkungan	%	83,24	71,99	77,58	107,76

		Persentase Pembangunan Jembatan Baru	%	58,42	64,64	64,84	100
		Persentase Pemeliharaan Jembatan	%	96,08	71,41	71,75	100
		Persentase Pembangunan Pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki, penyandang difabel dan lansia	%	19,85	21,01	21,15	100
		Persentase Pemeliharaan Pedestrian	%	75,64	91,15	87,79	96,31
2	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penataan dan Pemeliharaan Reklame	%	100	100	100	100

Sumber : Data Bidang Bina Marga, 2024

2. Indikator Persentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi drainase perkotaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014, Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan. Sedangkan Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan adalah pemerintah, badan usaha, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi ditunjuk sebagai dinas yang menyelenggarakan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, dan hal ini tertuang pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang baik agar Penyelenggaraan n dapat

terlaksana dengan baik. Berikut adalah tabel Capaian Kinerja Indikator Persentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi drainase perkotaan

Rumus Perhitungan : Program pengelolaan sumber daya air (55%) + program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase (45%)

Program pengelolaan sumber daya air

Indikator Persentase Infrastruktur Bangunan Air dalam kondisi Baik	Tahun 2024		
	Kondisi Ideal	Capaian	%Capaian (Presentase unit atau km yang dikerjakan N-1 + (Capaian/Kondisi Ideal)
		km	%
Persentase Pembangunan Polder	112,00 Unit	2 unit	41,96%
Persentase Pemeliharaan Polder	42,00 Unit	0 unit	40,48%
Presentase Pembangunan Turap	128,79 km	2,63 km	50,69%
Presentase Pemeliharaan Turap	57,96 km	0,54 km	85,39%
% Rata – Rata dari Capaian Program SDA			54,63%
(% Total Capaian SDA + % Kondisi Tahun 0)*55%			30,05%

Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

Indikator Persentase Infrastruktur Drainase Perkotaan dalam kondisi baik	Tahun 2024		
	Kondisi Ideal	Capaian	%Capaian (Capaian/Kondisi Ideal*Koefisien%)
	km	km	%
Target Rencana Panjang drainase yang akan dibangun/tahun	9093,16	76,41	0,519%
Target Rencana Pemeliharaan drainase/ Tahun	5632,046	79,1	0,537%
Target Rencana Peningkatan drainase/ Tahun			
Target Rencana rehabilitasi drainase/ Tahun			
% Total Capaian Drainase			1,0558%
% Total Capaian Drainase + % Kondisi Tahun 0			62,9930%
(% Total Capaian Drainase + % Kondisi Tahun 0)*45%			28,34%

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi drainase perkotaan

Sasaran 2	Terlaksananya penanganan Infrastruktur dan data informasi Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan beriorentasi lingkungan		
Indikator	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian

Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi drainase perkotaan	58,39%	• Drainase 22,5 km • Polder 2 unit • Turap 3 km	58,39%	• Drainase 155,47 km • Polder 1 unit • Turap 3,17 km	100%

Sumber : Data Bidang Sumber daya Air, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi tahun 2024 yaitu 58,39% dengan persentase capaian 100 % dari target yang di tentukan. Dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Bidang Sumber Daya Air tahun 2024 telah mencapai target capaian kinerja yang direncanakan.

Dari analisa data pencapaian kinerja Indikator Persentase Drainase dalam Kondisi Baik, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2024 sudah mencapai 100%.

Faktor pendukung pencapaian antara lain :

1. Adanya UPTD Pematusan yang bertugas membersihkan saluran (normalisasi) dan pengangkatan sedimen

Gambar 3.1 Tim URC Pematusan

2. Adanya UPTD Alat Berat yang tugas pokoknya membersihkan saluran dengan lebar 1 meter dan akses manuver serta operasional tidak ada halangan utulitas kabel, pipa dan lain-lain.

Gambar 3.2 Tim Alat Berat

3. Adanya TIM URC SDA yang mempunyai tugas :
    1. Melakukan pengeringan genangan akibat hujan dengan pompa;
    2. Menindaklanjuti laporan dari warga terkait permasalahan drainase;
    3. Melakukan pengecekan pompa, pintu air dan genset agar berfungsi dengan normal;

Gambar 3.3 Tim URC SDA

4. Telah dilaksanakan setiap bulan Rapat dan Briefing internal Bidang untuk antisipasi, pemantapan dan penyempurnaan terhadap kegiatan yang belum, sedang dan akan dilaksanakan, juga terhadap kinerja pegawai.
5. Bidang Sumber Daya Air DBMSDA memiliki SIDALPRO (Sistem Informasi Pengendalian Proyek) yaitu suatu sistem informasi elektronik yang memudahkan pemantauan pelaksanaan tiap proyek di Bidang Sumber Daya Air sejak awal proses pengadaan sampai dengan serah terima akhir pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan lebih efektif dan efisien.
6. Bidang Sumber Daya Air mengeluarkan rekomendasi Peil Banjir untuk pembangunan di Kota Bekasi sebagai upaya pencegahan terjadinya kerusakan

Sumber daya Air dan genangan, juga perbaikan fasilitas dan daerah tangkapan air yang ada di daerah pembangunan.

7. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan diantaranya dengan pelayanan Peil Banjir melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, dan penyebaran informasi melalui website, dan sosial media.

Pencapaian indikator Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi drainase perkotaan pada Tahun 2024 ini didukung oleh indikator capaian Program Pengelolaan Sistem Drainase yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi drainase perkotaan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Pembangunan drainase jalan	Persen	60,59	60,40%	61,16%	101,25 %
		Persentase Pemeliharaan drainase	Persen	69,54	68,87%	69,59%	95.23%
2	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Pembangunan Polder	%	22,06	41,96%	41,96%	100%
		Persentase Pemeliharaan Polder	%	1,72	42,86%	40,48%	94,4
		Presentase Pembangunan Turap	%	N/A	50,12%	50,69%	101,14
		Presentase Pemeliharaan Turap	%	N/A	86,49%	85,39%	98,72

Sumber : Data Bidang Sumber daya Air, 2024

Dari table berikut dilihat bahwa dari 97,37% capaian realisasi anggaran, capaian indikator sasaran Persentase Jembatan dalam kondisi baik yang dihasilkan sebesar 171% sehingga terdapat efisiensi sumber daya (anggaran) sebesar 73,63 %

Tabel 3.9
Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator Sasaran

No	Indikator sasaran/ kebutuhan Anggaran / Efisiensi	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi drainase perkotaan	58,39%	58,39%	100%
	Anggaran yang Dibutuhkan	287.495.490.395	240.790.323.582	83,75%
Nilai Efisiensi				**16,25%**

3. Indikator Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai Perangkat Daerah yang dilimpahkan sebagian wewenang oleh Wali Kota Bekasi melalui PeraturanWali Kota Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Hal tersebut menyebabkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menjadi penanggung jawab pada bidang urusan kebinamargaan terhadap Indikator Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, program pemukiman dinyatakan tidak tepat sebagai pengampu urusan Penerangan Jalan Umum (PJU). Sehingga agar relevan urusan berada di bawah program penyelenggaraan jalan, yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, pengelolaan PJU diarahkan untuk dialihkan ke program penyelenggaraan jalan agar pelaksanaannya lebih sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam regulasi tersebut, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Rumus Perhitungan = Program pengembangan pemukiman/ Program Penyelenggaraan Jalan khusus urusan PJU (81%) + Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (19%)

Program pengembangan pemukiman/ Program Penyelenggaraan Jalan khusus urusan PJU

Indikator Persentase penerangan jalan umum dalam kondisi baik	Tahun 2024		
	Kondisi Ideal	Capaian	%Capaian (Presentase unit atau km yang dikerjakan N-1 + (Capaian/Kondisi Ideal)
	titik	tititk	%
Persentase Pembangunan PJU Baru	112.550 tititk	1.903 titik	56,25%
Jumlah Pemeliharaan PJU	59.403 titik	11.252 titik	18,94%
% Rata – Rata dari Capaian Program PJU			78,12%
% Total Capaian PJU*81%			63,28%

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Indikator Persentase Persentase Pengembangan Keanekaragaman Hayati Kota	Tahun 2024		
	Kondisi Ideal	Capaian	%Capaian (Capaian/Kondisi Ideal*Koefisien%)
	km	km	%
Target Taman Yang akan dibangun	76	3,24	3,544%
Target taman yang akan dipelihara	15	2,50	2,735%
% Total Capaian KEHATI			6,28%
% Total Capaian KEHATI + % Kondisi Tahun 0			25,77%
(% Total Capaian KEHATI + % Kondisi Tahun 0)* 19%			4,89%

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan

Sasaran 2	Terlaksananya penanganan Infrastruktur dan data informasi Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan beriorentasi lingkungan				
Indikator	Tahun 2024				
	Target		Realisasi		Capaian
Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan	67,81%	• PJU 12.251 titik • Taman 6 Ha	68,18%	• PJU 13.154 titik • Taman 5,74 Ha	100,54%

Sumber : Data Bidang Pemanfaatan Ruang Jalan dan Taman, 2024

Dengan melihat tabel diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 67,18 persen, sementara realisasi mencapai 68,18 persen maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan sebesar 100,54 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2024 tercapai.

Berikut adalah factor yang mendukung pencapaian indikator Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan yaitu :

1. Komitmen Kepala daerah untuk Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu
2. Adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengukit pencapaian sasaran strategis
3. Etos kerja aparatur Dinas BMSDA yang semakin meningkat
4. Adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengukit pencapaian sasaran strategis
5. Etos kerja aparatur Dinas BMSDA yang semakin meningkat
6. Adannya Tim URC Taman yang mempunyai tugas melakukan pemeliharaan pohon-pohon di jalur jalan protokol maupun area publik untuk meminimalisir dampak terjadinya pohon tumbang

7. Adannya Tim URC PJU yang mempunyai tugas penanganan pengaduan permasalahan pada lampu Penerangan jalan umum\

Gambar 3.4 Tim URC PJU

Dari table berikut dilihat bahwa dari 94,2 % capaian realisasi anggaran, capaian indikator sasaran Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan yang dihasilkan sebesar 100,5 % sehingga terdapat efisiensi sumber daya (anggaran) sebesar 6,3 %

Tabel 3.11
Efisiensi Anggaran Berdasrkan Pencapaian Indikator sasaran

No	Indikator sasaran/ kebutuhan Anggaran / Efisiensi	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan	67,18%	68,18%	100,5%
	Anggaran yang Dibutuhkan	78.199.419.591	73.676.901.522	94,2%
Nilai Efisiensi				**6,3%**

Program yang menunjang dalam pencapaian indikator Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan adalah program penyelenggaraan jalan dan program pengelolaan keanekaragaman hayati. Adapun capaian kinerja indikator program sebagai berikut :

Tabel 3.12
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Program Pengembangan Permukiman	Persentase peningkatan pembangunan PJU Baru	%	56,37	55,44	56,25	101,5

		Presentase Pemeliharaan PJU	titik	8.150	11.250	11.252	100
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).	Persentase Pembangunan Taman Baru	%	20,53	22,37	24,67	110,28
		Persentase Pemeliharaan Taman	%	97,16	98,02	98,02	100

Sumber : Data Bidang Pemanfaatan Ruang Jalan dan Taman, 2024

4. Indikator Presentase Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA

Pengembangan jasa konstruksi dalam lingkup kota memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jasa konstruksi berkontribusi langsung pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, gedung perkantoran, fasilitas umum, serta perumahan. Infrastruktur yang memadai menjadi fondasi penting bagi aktivitas ekonomi, mobilitas penduduk, dan pelayanan publik yang efisien. Selain itu, sektor konstruksi menciptakan lapangan kerja dan mendorong sektor-sektor lain, seperti manufaktur, perdagangan, dan jasa pendukung, untuk tumbuh seiring meningkatnya permintaan akan material dan layanan terkait.

Kepentingan pengembangan jasa konstruksi di lingkup kota juga terkait erat dengan perencanaan kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang dirancang secara strategis dapat membantu mengatasi masalah perkotaan, seperti kemacetan, banjir, dan kekurangan perumahan. Selain itu, penerapan teknologi ramah lingkungan dan konsep smart city dalam konstruksi dapat mendukung efisiensi energi dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Dengan demikian, pengembangan jasa konstruksi yang terencana tidak hanya meningkatkan daya saing kota, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih layak huni bagi masyarakat kini dan masa depan.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai Perangkat Daerah yang dilimpahkan sebagian wewenang oleh Wali Kota Bekasi melalui PeraturanWali Kota

Nomor 20 Tahun 2024Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Hal tersebut menyebabkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menjadi penanggung jawab pada bidang urusan jasa konstruksi.

Rumus Perhitungan = Jumlah capaian jasa konstruksi pada Tahun N/Jumlah target jasa konstruksi pada Tahun N x 100%

Adapun capaian kinerja indikator Presentase Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDAdapat dilihat pada tabel berikut**:**

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Presentase Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024		
	Target	**Realisasi**	**Capaian**
Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA	100	40	40

Sumber : Data Bidang Perencanaan dan jasa konstruksi, 2024

Dengan melihat tabel diatas bahwa realisasi Indikator Presentase Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA mencapai 40 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2024 telah tidak tercapai.

Berikut adalah factor yang mendukung pencapaian indikator Persentase Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA k yaitu :

1. Adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengukit pencapaian sasaran strategis
2. Etos kerja aparatur Dinas BMSDA yang semakin meningkat

Tabel 3.14
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Program pengembangan Jasa Konstruksi	Presentase pengembangan jasa konstruksi dalam keadaan baik	%	100	90	90

Sumber : Data Bidang Perencanaan dan jasa konstruksi, 2024

Dari tabel berikut dilihat bahwa dari 86,05 % capaian realisasi anggaran, capaian indikator sasaran Persentase Taman dalam kondisi baik yang dihasilkan sebesar 116,72% sehingga terdapat efisiensi sumber daya (anggaran) sebesar 30,67 %

Tabel 3.15
Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator sasaran

No	Indikator sasaran/ kebutuhan Anggaran / Efisiensi	Target	Realisasi	Capaian
1	**Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA**	100	40	40
	Anggaran yang Dibutuhkan	943.000.000	110.975.000	11,77

3.3 ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air berkaitan dengan anggaran belanja.

Jumlah anggaran belanja pada Dinas BMSDA pada tahun 2024 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.16 Tabel Anggaran Belanja pada Dinas BMSDA

NO	NAMA PROGRAM	APBD MURNI			APBD PERUBAHAN		
		JML KEG	JML SUB KEG	PAGU (Rp)	JML KEG	JML SUB KEG	PAGU (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7	20	103.388.421.720	7	19	96.310.166.720
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1	5	50.747.600.000	1	7	55.936.607.577
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	1	5	205.959.963.064	1	5	231.558.882.818

	PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1	12	272.576.483.895	1	12	308.370.924.245
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1	1	3.805.441.720	1	1	3.805.441.720
6	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3	4	730.000.000	3	5	943.000.000
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1	3	33.737.004.373	1	3	44.629.306.522
JUMLAH		15	50	670.944.914.772	15	52	741.554.591.602

Sumber Data : E-Monev 2024

Akuntabilitas keuangan pada Dinas BMSDA Kota Bekasi didasarkan pada penyerapan anggran untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Adapun rincian realisasi Program dapart dilihat pada table dibawah ini :

Tabel. 3.17
Realisasi Anggaran DBMSDA Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			Rp	KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	6	7
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96.310.166.720	80.893.955.509	83,99	99,52
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	55.936.607.577	39.151.447.895	69,99	100,00
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	231.558.882.818	201.638.875.687	87,08	97,32
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	308.370.924.245	279.849.057.000	90,75	99,52
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	943.000.000	110.975.000	11,77	35,18
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.805.703.720	3.112.957.630	81,80	100,00
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	44.629.306.522	37.659.864.429	84,38	100,00
TOTAL		**741.554.591.602**	**642.417.133.150**	**86,63**	**98,82**

Sumber : E-monev Tahun 2024

3.4 ANALISIS ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN SRATEGIS

Analisis anggaran berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh dinas BMSDA dapat dilihat pada table dibawah ini:

Table 3.18 Analisis Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran	Pagu	Realisasi	%
1	Mewujudkan Penyelenggaran Pemerintahan yang akuntabel	96.310.166.720	80.893.955.509	88,37
2	Terlaksananya penanganan Infrastruktur dan data informasi Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan beriorentasi lingkungan	645.244.424.882	561.523.177.641	87,02

Sumber Data : Aplikasi Simda Tahun 2024

3.5 PRESTASI ORGANISASI

Selama kurun waktu 5 tahun Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sudah mendapatkan prestasi yabg dapat dilihat pada table dibawah ini :

Table 3.19 Penghargaan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

No	Penghargaan	Tanggal	Dokumentasi
1	Piagam penghargaan diberikan kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai Juara 3 **Kategori Perangkat Daerah Terinovatif** dala Acara : **Kota Bekasi Innovation Week** 2020, yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan	**2020**	

	penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.		

BAB IV
PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-Prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2024-2026 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Tahun 2024 merupakan tahun ke-lima dari rencana Strategis Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Keberhasilan yang telah dicapai meupakan Kerjasama dan partisipasi dari semua pihak dan harus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, sedangkan target yang belum tercapai harus dapat diantisipasi kendala -kendala yang ada untuk dapat dicari solusinya sehingga untuk tahun mendatang capaian realisasi dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Meskipun target kinerja tahun 2024 hampir semua tercapai, tetapi ada beberapa evaluasi yang harus ditindaklanjuti agar kinerja tahun 2024 menjadi lebih baik lagi. Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan tahun 2025 adalah :

1. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan
2. Pembangunan Polder Sebagai mitigasi menangani banjir akibat kondisi topografi Kota Bekasi
3. Melaksanakan penanganan banjir dan penyelenggaran drainase kota dengan upaya – upaya yang dituangkan dalam bentuk kegiatan rutin tahunan
4. Meningkatkan kualitas seluruh dokumen Perencanaan

5. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang kompeten dengan mengikuti bimbingan teknis, workshop, sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan di bidangnya masing-masing.
6. Menjalin Kerjasama dengan instansi lain (stakeholder) dalam pelaksanaan program-program dan melakukan Upaya-upaya progresif dalam rangka pencapaian indikator sasaran yang telah dilakukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan dan meningkatkan capaian kinerja dimasa yang akan datang dan diharpkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bekasi, 13 Januari 2025

Kepala Dinas Bina Marga
Dan Sumber Daya Air,

Drs. Aceng Solahudin
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 196909191990061001

LAMPIRAN

1. SK Penyusunan LKIP Dinas BMSDA TA 2024

PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
Jl. Raya Siliwangi KM.5 Gang B.H.Djaini RT.007 RW.001 Bojong Rawalumbu
Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi
Kode Pos 17116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KOTA BEKASI
NOMOR :600/Kep.461.DBMSDA/XII/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER
DAYA AIR KOTA BEKASI TAHUN 2024

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 82 Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 107 seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi tahun 2024.

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, tetap memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan disadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Desember 2024
KEPALA DINAS BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI

Drs. ACENG SOLAHUDIN

Tembusan
1. Pj. Wali Kota Bekasi
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Bagian Organisasi Kota Bekasi.

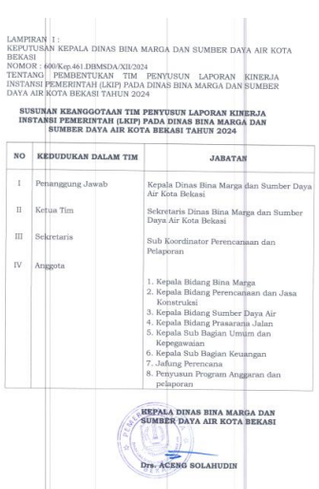

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI
NOMOR : 600/Kep.461.DBMSDA/XII/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
II	Ketua Tim	Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
III	Sekretaris	Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan
IV	Anggota	1. Kepala Bidang Bina Marga 2. Kepala Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi 3. Kepala Bidang Sumber Daya Air 4. Kepala Bidang Prasarana Jalan 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 6. Kepala Sub Bagian Keuangan 7. Jafung Perencana 8. Penyusun Program Anggaran dan pelaporan

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI

Drs. ACENG SOLAHUDIN

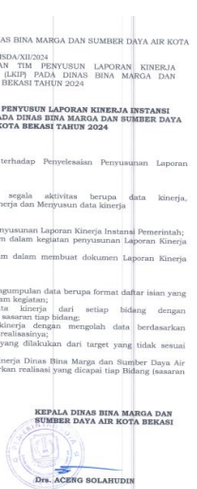

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI
NOMOR : 600/Kep.461.DBMSDA/XII/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI TAHUN 2024

1. Penanggung Jawab
   - Bertanggungjawab terhadap Penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja
2. Ketua
   - Mengkoordinasikan segala aktivitas berupa data kinerja, menganalisa data kinerja dan Menyusun data kinerja
3. Sekretaris
   - Menyusun jadwal penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
   - Membantu Ketua Tim dalam kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
   - Membantu Ketua Tim dalam membuat dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Anggota
   - Menyusun daftar pengumpulan data berupa format daftar isian yang berisi sasaran, program kegiatan;
   - Mengumpulkan data kinerja dari setiap bidang dengan mengelompokan dari sasaran tiap bidang;
   - Menganalisa data kinerja dengan mengolah data berdasarkan indikator, target dan realisasinya;
   - Menganalisa upaya yang dilakukan dari target yang tidak sesuai realisasi;
   - Menyusu Laporan Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berdasarkan realisasi yang dicapai tiap Bidang (saasaran program).

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI

Drs. ACENG SOLAHUDIN